

# Kajian Pengelolaan Sampah sebagai Masukan dalam Peraturan Desa Di Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

**Gilang Roofiif Ansori**

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

[\\*gilangra999@gmail.com](mailto:gilangra999@gmail.com)

**Abstract.** Garbage is the remains of human daily activities or natural processes in the form of solid or semi-solid in the form of biodegradable or non-biodegradable organic or inorganic substances deemed useless and disposed of into the environment. From this the Village Government wants to make a Village Regulation regarding Waste Management, in addition to implementing the Bandung Regency Perda regarding waste management. Perdes regarding waste management in Panyocokan Village is made to streamline implementation which later aims to accelerate the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, and community participation in waste management. This study aims to identify the content of policies that need to be applied to solve problems regarding waste management in Panyocok Village. To achieve this goal, researchers used a mix method approach. As well as using population projection analysis, analysis of waste generation, analysis of TPS needs, analysis of public policies (W. Dunn, 200) and data collection methods of interviews, observations, and Focus Group Discussion. The results of this study focus on the content of Planning, Implementation, and Control of waste management for the next 10 years in Panyocokan Village, which is tailored to the regional conditions and characteristics of the Panyocokan Village community.

**Keywords:** Garbage, Village Regulations, Planning, Implementation, Control.

**Abstrak.** Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Dari hal tersebut Pemerintah Desa ingin membuat Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Sampah, selain itu untuk menjalankan Perda Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan sampah. Perdes mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan adalah dibuat untuk mengefektifkan implementasi yang nantinya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode mix method. Serta menggunakan analisis proyeksi penduduk, analisis timbulan sampah, analisis kebutuhan TPS, analisis kebijakan publik (W. Dunn, 200) dan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion. Hasil dari penelitian ini berfokus kepada muatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian pengelolaan sampah untuk 10 tahun ke depan di Desa Panyocokan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Desa Panyocokan.

**Kata Kunci:** Sampah, Peraturan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian

## 1. Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkan sebuah aturan atau intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan Bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya. Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Sumber : Ilmuadmpublik.com, 2020).

Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung merupakan desa yang memiliki beragam jenis kegiatan ekonomi dan potensi seperti pertanian, Home industry, perdagangan jasa dan pariwisata. Kegiatan ekonomi tersebut menimbulkan dampak buruk yaitu timbunan sampah di sekitar Desa Panyocokan serta mayoritas sampah yang ada dihasilkan dari limbah rumah tangga masyarakat sekitar Desa Panyocokan. Saat ini pemerintah Desa Panyocokan tengah berfokus terhadap penanganan sampah rumah tangga dalam mewujudkan Kabupaten Bandung 2020 bebas sampah sesuai arahan Bupati Kabupaten Bandung yang dicanangkan pada akhir tahun 2019 lalu.

Kondisi yang ada di Desa Panyocokan saat ini, masyarakat umumnya mengelola sampah dengan cara dibakar ataupun di buang langsung ke sungai yang secara langsung akan membuat kerusakan lingkungan. Sebagian besar masyarakat menganggap membakar sampah merupakan bagian dari pengolahan sampah. Akan tetapi, hal seperti itu bisa menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Di sisi lain belum adanya aturan konkret mengenai pengelolaan sampah yang seharusnya di canangkan oleh pemerintah Desa Panyocokan yang membuat kekhawatiran di kalangan masyarakat sekitar, perihal solusi mengenai timbunan sampah yang dapat merugikan seluruh element masyarakat di Desa Panyocokan. Oleh karena itu, tidak adanya peraturan yang jelas menyebabkan kebingungan dan ketidak jelasan yang ada di masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Serta tidak adanya sarana dan prasarana pembuangan sampah baik di lingkup desa maupun di masing – masing rumah masyarakat Desa Panyocokan menyebabkan masyarakat menjadi membuang sampah tidak pada tempatnya.

Selain itu perlunya Perdes mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan adalah dibuat untuk mengefektifkan implementasi yang nantinya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Karena pada hakikatnya masyarakat desa memiliki sifat yang homogen dan lebih disiplin mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin yang berada dekat dengan masyarakat dalam hal ini Pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### A. Rumusan Masalah

1. Apa saja potensi dan masalah mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan?
2. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Desa Panyocokan ?
3. Muatan Kebijakan apasaja yang perlu diterapkan mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan ?

### B. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan.
2. Mengidentifikasi peran stakeholder yang terlibat mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan.
3. Menganalisis muatan kebijakan apa saja yang perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Desa Panyocokan.

## 2. Metodologi

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode *Mix Method* antara kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan di antaranya:

- A. Analisis Teknis Operasional pengelolaan sampah

Analisis ini merupakan analisis data yang nantinya akan dibandingkan dengan kriteria atau pedoman yang sudah di paparkan di Bab II Tinjauan Pustaka. Hal – hal yang dirujuk ialah mengenai teknis pemilahan, pengangkutan, Kelembagaan, Program dan pengembangan pembiayaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi.

#### B. Proyeksi Penduduk 10 Tahun

Proyeksi penduduk yang digunakan adalah metode Linier dengan cara Geometrik. Alasan menggunakan metode tersebut adalah Desa Panyocokan seperti desa pada umumnya yang angka pertumbuhan dan penurunan penduduk di setiap tahunnya tidak terlalu signifikan

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

Keterangan :

$P_n$  : penduduk pada tahun  $n$

$P_0$  : Penduduk pada tahun awal

$1$  : angka konstanta

$r$  : angka pertumbuhan penduduk (dalam persen)

$n$  : jumlah rentang taun dari awal hingga tahun  $n$

#### C. Analisis Timbulan Sampah

Analisis timbulan sampah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar timbulan sampah yang ada di Desa Panyocokan saat ini hingga 10 tahun mendatang berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun Analisis Timbulan sampah ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Domestik} = \frac{\text{Timbulan Sampah} \left( \frac{1}{h} \right) \times \text{Jumlah Penduduk}}{1000 \text{ (satuan m}^3\text{)}} \\ \text{Non Domestik} = 30\% \text{ dari domestik}$$

#### D. Analisis Kebutuhan TPS

Analisis ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak TPS 3R diwilayah tersebut, untuk cara perhitungannya bisa dilihat dibawah ini :

$$\frac{\text{Volume timbulan sampah} \times \text{Faktor Pemasatan}}{\text{Volume TPS}}$$

#### E. Analisis Kebutuhan Prasarana Pengangkutan Sampah

Analisis ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak kebutuhan armada pengangkutan sampah diwilayah Desa Panyocokan di masa yang akan datang. Untuk cara perhitungannya bisa dilihat dibawah ini :

$$n_t = \frac{VS}{VB}$$

Dimana :

$n_t$  = Jumlah truck yang dibutuhkan

$VS$  = Volume sampah yang dihasilkan per hari

$VB$  = Volume kapasitas kendaraan ( $m^3/rit$ )

Serta untuk rumus Konsep Ritasi adalah sebagai berikut :

$\Sigma$  Ritasi = waktu kerja/waktu tempuh

1 Hari Pengangkutan = Jumlah Ritasi x Volume Truk Sampah

Keperluan Truk = (Volume Sampah/Hari x 0,71)/ 1 Hari pengangkutan

#### F. Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder adalah sebuah proses memetakan posisi stakeholder terhadap kegiatan yang akan dijalankan atau dirancang oleh organisasi publik, melakukan analisis stakeholder sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui siapasiapa saja atau pihak mana saja yang akan bekerja sama dalam mewujudkan sebuah tujuan kebijakan atau

program. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis stakeholder Grimble dan Wellard dalam (Aisyah, Yusuf, & Lawelle, 2017) adalah PI (Power dan Interest).

#### G. Analisis Pendekatan Regulative dan Alokatif

Analisis pendekatan regulative dan alokatif berupa data kualitatif hasil wawancara dan observasi mengenai kebijakan pengendalian berdasarkan kepada aspek social budaya, kondisi wilayah Desa Panyocokan, serta hasil muatan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan yang sudah dirumuskan.

### 3. Pembahasan dan Diskusi

#### A. Potensi dan Masalah Mengenai Pengelolaan Sampah di Desa Panyocokan

Dari hasil observasi didapatkan beberapa potensi mengenai pengelolaan sampah yang ada di Desa Panyocokan yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat TPS Tematik atau TPS berbasis maggot di RW 22 KP Lemburkolot.
2. Adanya Program gotong royong membersihkan sampah 3 bulan sekali.
3. Beberapa RW sudah memiliki TPS walaupun masih berupa lahan tanah kosong.
4. Umumnya kepemilikan tanah TPS yang ada di Desa Panyocokan sudah tanah hibah dari masyarakat.

Adapun permasalahan mengenai pengelolaan sampah secara umum di Desa Panyocokan yaitu :

1. TPS yang ada masih berupa lahan kosong sehingga sering terjadi timbunan sampah yang cukup besar di area TPS.
2. TPS berada di dekat wilayah Pemukiman.
3. Fasilitas sarana dan prasarana persampahan ketersediaannya belum merata di setiap RW.
4. Belum adanya kesadaran dari masyarakat sekitar tentang dampak dari membuang sampah sembarangan sehingga banyaknya timbunan sampah di beberapa titik di Desa Panyocokan.
5. Masyarakat umumnya mengelola sampah dengan cara dibakar ataupun di buang langsung ke sungai yang secara langsung akan membuat kerusakan lingkungan.
6. Kurangnya edukasi kepada masyarakat perihal pengelolaan sampah.

#### B. Analisis Stakeholder Pengelolaan Sampah di Desa Panyocokan

Dalam sub bab in akan dibahas mengenai Peran Fungsi Stakeholder pengelolaan sampah di Desa Panyocokan saat ini serta kedudukan setiap Stakeholder dalam analisis stakeholder menurut Grimble dan Wellard. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel mengenai peran dan fungsi stakeholder pengelolaan sampah Desa Panyocokan.

Tabel 5.1 Peran dan Fungsi Stakeholder Persampahan Desa Panyocokan Saat Ini

No	Stakeholder	Peran	Fungsi
1	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Kebijakan/Program mengenai pengelolaan sampah</li> <li>- Membina dan membimbing masyarakat dengan melakukan sosialisasi</li> <li>- Menyediakan Fasilitas ataupun sarana dan prasarana persampahan</li> </ul>	Sebagai pelaksana dan pengawas dalam suatu program atau kebijakan yang sudah ditetapkan.
2	Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah</li> </ul>	Partisipator dan menjaga kebersihan Desa Panyocokan

No	Stakeholder	Peran	Fungsi
3	Petugas Kebersihan Kabupaten Bandung	- Mengangkut sampah masyarakat setiap 1 minggu sekali	Mengambil sampah dari rumah rumah warga yang sudah dikumpulkan selama 1 minggu

Sumber : Hasil Wawancara, 2021

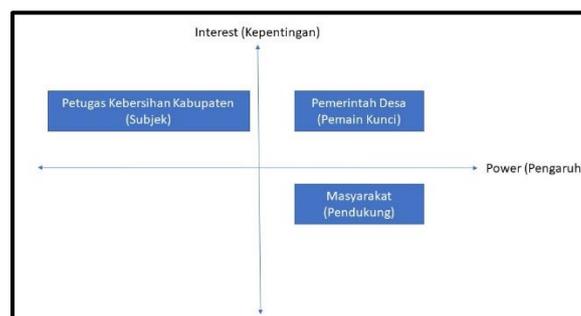
Mengenai Peran 3 aktor tersebut berdasarkan analisis stakeholder adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa berperan sebagai *Policy Creator*, Koordinator dan Fasilitator. Alasannya karena dilihat dari peran dan fungsi yang ada pada tabel 5.1 Pemerintah Desa sebagai pembuat program atau kebijakan sekaligus sebagai pengawas, Pembina, pembimbing dan penyedia sarana prasarana persampahan.
2. Masyarakat Desa berperan sebagai Implementator. Alasannya karena masyarakat bertugas untuk mendukung serta menjalankan program yang dibuat oleh Pemdes dalam hal pengelolaan sampah.
3. Petugas Kebersihan Kabupaten berperan sebagai akselelator. Alasannya karena tugasnya hanya untuk mengangkut sampah yang ada di masyarakat, yang artinya sebagai peran pendukung agar dapat mengefektifkan program yang ada.

Dari 3 aktor tersebut berdasarkan analisis stakeholder dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa di klasifikasikan sebagai Pemain kunci (key player) yang memiliki kepentingan tinggi serta memiliki pengaruh yang tinggi pula. Alasan dari penempatan klasifikasi tersebut karena keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh kebijakan atau program pemdes dan pengaruhnya yang cukup kuat yaitu sebagai pelaksana dan pengawas dari kebijakan yang sudah dibuat mengenai pengelolaan sampah.
2. Masyarakat Desa di klasifikasikan sebagai Pendukung (contest setter) yang memiliki kepentingan yang rendah akan tetapi memiliki pengaruh yang tinggi. Alasan dari penempatan tersebut karena pengelolaan sampah yang ada di Desa Panyocokan akan dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakat sekitar yang dampaknya akan dirasakan masyarakat dan actor lainnya, namun masyarakat tidak memiliki kepentingan apapun dalam pengelolaan sampah yang ada saat ini.
3. Petugas Kebersihan Kabupaten di klasifikasikan sebagai Subyek yang memiliki kepentingan yang tinggi akan tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Alasannya karena kepentingannya sebagai pengangkut sampah untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, namun pengaruh dalam pengelolaan sampah saat ini sangat rendah dikarenakan petugas kebersihan tidak melayani seluruh wilayah Desa Panyocokan dan tidak mengurangi permasalahan sampah yang ada di Desa Panyocokan.

Dari 2 tahap analisis diatas maka dapat disimpulkan melalui diagram matriks PI (Power dan Interest) yang dikemukakan oleh Grimble dan Wellard. Dari Matriks tersebut nantinya akan dapat menyimpulkan kekurangan dari keterlibatan stakeholder pengelolaan sampah di Desa Panyocokan.



Gambar 5.3 Matriks Mendelow Stakeholder Pengelolaan Sampah Desa Panyocokan

*Sumber : Hasil Analisis, 2021*

### C. Muatan Kebijakan Mengenai Pengelolaan Sampah di Desa Panyocokan

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai inti dari output penelitian yaitu muatan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3 kategori muatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

#### a. Muatan Perencanaan

Konsep 3R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle menjadi focus besar pengelolaan sampah. Alasannya karena dirasa cocok dengan kondisi yang ada saat ini di Desa Panyocokan, serta menerapkan Perda Kabupaten Bandung No 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 12 yang mengharuskan pengelolaan sampah berkonsep 3R.

- **Tahap Pewadahan**

Pewadahan yang direncanakan ialah pewadahan individual. Dimana masyarakat diwajibkan untuk menyiapkan wadah sampah masing – masing bisa berupa tong sampah atau trash bag untuk pemilahan sampah organik dan anorganik secara individu.

- **Tahap Pengumpulan**

Tahap pengumpulan yang direncanakan adalah berpola individual tidak langsung yaitu dari rumah ke rumah. Alasannya karena kondisi akses jalan yang tidak memungkinkan untuk pola lainnya yang menggunakan truk sampah

- **Tahap Pemilahan**

Pemilahan yang dilakukan adalah sampah organik diangkut menggunakan Sepeda Motor Bak Roda 3 yang berbeda dengan sampah anorganik. Dimana sampah organik menuju TPS tematik, sementara untuk sampah anorganik akan langsung dibawa menuju TPS Depot.

- **Tahap Pengangkutan**

Sebelumnya akan dilakukan analisis untuk menentukan sarana dan prasarana. Utamanya adalah menentukan kebutuhan TPS yang ada di Desa Panyocokan untuk 10 tahun ke depan.

**Tabel 5.2 Proyeksi Penduduk Desa Panyocokan tahun 2021 - 2030**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2021	13.364
2.	2022	13.477
3.	2023	13.592
4.	2024	13.708
5.	2025	13.824
6.	2026	13.942
7.	2027	14.060
8.	2028	14.180
9.	2029	14.300
10.	2030	14.442

*Sumber : Hasil Analisis, 2021*

Desa Panyocokan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang konstan, di setiap tahunnya tidak ada penurunan jumlah penduduk.

**Tabel 5.3**Proyeksi timbulan sampah per tahun Desa Panyocokan 2021 - 2030

Tahun	Domestik (m <sup>3</sup> /Tahun)	Non Domestik (m <sup>3</sup> /Tahun)	Total (m <sup>3</sup> /Tahun)
2021	12.194,6	3.658,3	15.853,04
2022	12.297,7	3.689,3	15.987,09
2023	12.402,7	3.720,8	16.123,51
2024	12.508,5	3.752,5	16.261,11
2025	12.614,4	3.784,3	16.398,7
2026	12.722,07	3.816,6	16.538,69
2027	12.829,7	3.848,9	16.678,67
2028	12.939,2	3.881,7	16.821,025
2029	13.048,7	3.914,6	16.963,37
2030	13.178,3	3.953,4	17.131,82

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis proyeksi timbulan sampah pertahun, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang konstan.

**Tabel 5.4 Proyeksi timbulan sampah per Hari Desa Panyocokan 2021 - 2030**

Tahun	Domestik (m <sup>3</sup> /Hari)	Non Domestik (m <sup>3</sup> /Hari)	Total (m <sup>3</sup> /Hari)
2021	33,41	10,02	43,43
2022	33,69	10,10	43,80
2023	33,98	10,19	44,17
2024	34,27	10,28	44,55
2025	34,56	10,36	44,92
2026	34,85	10,45	45,31
2027	35,15	10,54	45,69
2028	35,45	10,63	46,08
2029	35,75	10,72	46,47
2030	36,10	10,83	46,93

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dari hasil analisis timbulan sampah dapat ditentukan berapa jumlah TPS yang dibutuhkan di Desa Panyocokan dengan menggunakan analisis kebutuhan TPS menggunakan rumus dibawah ini (Volume Sampah x Faktor Pemadatan)/ Volume TPS. Volume TPS yang akan digunakan berdasarkan hasil FGD adalah berkapasitas 35 m<sup>3</sup>. Dengan Faktor Pemadatan yang berupa standar adalah 0,71. Berikut merupakan perhitungan kebutuhan TPS yang ada di Desa Panyocokan :

$$(46,93 \text{ m}^3/\text{Hari} \times 0,71) / 35 \text{ m}^3 = 0,95200.$$

Dari hasil hitungan diatas keluar angka 0.95200 maka kebutuhan TPS di Desa Panyocokan hanya membutuhkan 1 TPS. Berikut merupakan perhitungan kebutuhan prasarana pengangkutan sampah yang ada di Desa Panyocokan untuk 10 tahun kedepan :

$46,93 \text{ m}^3/\text{Hari} / 3,5 \text{ m}^3 = 13,40$  atau 14 armada berdasarkan pembulatan

Hasil dari perhitungan didapatkan bahwa kebutuhan prasarana pengangkutan sampah adalah 14 armada, namun 14 armada tersebut hanya untuk 1 rit di setiap harinya. Armada dapat berkurang dengan konsep ritasi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$1 \text{ Ritasi} = 2 \times 30 \text{ Menit} = 1 \text{ Jam}$

$\text{Ritasi} = 8/1 \text{ Ritasi} = 8 \text{ Ritasi}$

Maka 1 Hari armada dapat mengangkut ( $8 \times 3,5 \text{ m}^3 = 28 \text{ m}^3$ )

Sehingga diperlukan armada =  $(46,93 \text{ m}^3/\text{Hari} \times 0,71) / 28 \text{ m}^3 = 1,19$  atau 2 Armada.

Dari hasil tersebut maka armada angkutan sampah roda 3 hanya dibutuhkan 2 armada saja untuk memaksimalkan pengangkutan untuk tiap armadanya dari pagi hingga sore, serta untuk memangkas biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah di Desa Panyocokan.

- **Kelembagaan atau Stakeholder**

Setelah melakukan analisis dan berdasarkan hasil FGD, ada beberapa perubahan terkait Stakeholder dalam hal ini kelembagaan , baik pelaku maupun peran dan fungsi setiap actor yang terlibat. Serta akan ada actor baru yang terlibat yang diusulkan oleh Sekertaris Desa yang sebelumnya sudah di gagas oleh Kepala Desa yaitu tim saber, dimana tim saber merupakan satgas sampah yang dibentuk dengan tujuan untuk pengelolaan sampah di Desa Panyocokan.

**b. Muatan Pelaksanaan**

Menurut Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Sampah ada beberapa hal yang dilakukan untuk menentukan Pengelolaan sampah nantinya yaitu penjabaran peran fungsi dan tugas kelembagaan, Program dan pengembangan pembiayaan pengelolaan sampah.

- **Peran Fungsi dan Tugas Kelembagaan atau Stakeholder**

**Tabel 5.5**

**Tabel Analisis Peran, Fungsi dan Tugas Stakeholder yang Direncanakan**

No	Stakeholder	Peran	Fungsi	Tugas
1	Pemerintah Desa	- Policy Creator - Fasilitator	Sebagai pelaksana dan pengawas dalam suatu program atau kebijakan yang sudah ditetapkan dalam hal ini terkait pengelolaan sampah.	- Mengawasi kinerja tim saber - Melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah diawal masa transisi Perdes Pengelolaan sampah apabila sudah ditetapkan - Menyiapkan sarana dan prasarana persampahan secara bertahap
2	Masyarakat Desa	Implementor	Partisipator dan menjaga kebersihan Desa Panyocokan	- Melakukan Pemilahan sampah organic dan anorganik - Mentaati peraturan mengenai persampahan yang sudah ditetapkan nantinya - Menyediakan wadah sampah pribadi yang dibedakan antara organic dan anorganik
3	Petugas Kebersihan	Akselelator	Mengambil sampah dari TPS yang sudah	Mengambil sampah dan mengangkut sampah dari TPS

No	Stakeholder	Peran	Fungsi	Tugas
	Kabupaten Bandung		dikumpulkan selama 1 minggu.	yang sudah dikumpulkan selama 1 minggu.
4	Tim Saber	- Koordinator - Akselelator	Sebagai petugas dalam mempermudah masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab langsung kepada pihak Pemdes.	- Mengangkut sampah dari rumah rumah warga yang sudah dikumpulkan serta dipilah selama 3 hari sekali ke TPS . - Mengelola TPS Tematik Maggot. - Menjadi pengawas dan menindak masyarakat apabila melanggar Perdes yang sudah ditetapkan. - Melakukan Pelaporan kepada pihak Pemdes terkait tugasnya sebagai pengawas dan penindak masyarakat dalam hal sampah di Desa Panyocokan. - Melakukan pemilahan sampah botol plastic dan untuk dijadikan Bank Sampah. - Memberikan hasil bank sampah ke Bumdes
5	Bumdes	- Akselelator	Sebagai penghubung antara Tim Saber dan Pemdes dalam pemanfaatan hasil pengelolaan Bank Sampah yang ada	- Menerima hasil dari Bank sampah yang diserahkan oleh Tim Saber - Melaporkan hasil dari bank sampah ke pihak Pemdes - Menggunakan hasil bank sampah untuk menggaji tim saber dan merintis usaha lainnya.

Sumber : Hasil Analisis dan FGD, 2021

Berdasarkan hasil FGD peran dan fungsi stakeholder yang direncanakan nantinya akan mempermudah sistem koordinasi antar actor yang terlibat. Selain itu perubahan yang cukup signifikan terlihat dari adanya tugas yang wajib dilakukan oleh setiap stakeholder yang terlibat untuk terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan terkelola secara sistematis.

- **Program dan Pengembangan Biaya Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan hasil kesepakatan bahwa akan ada 2 program bank sampah yaitu budidaya maggot sebagai usaha pakan ternak ikan ataupun unggas, serta program bank sampah botol plastic yang akan dijual ke pengepul. Selain itu ada pemasukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah yaitu retribusi iuran setiap Kepala keluarga akan ditarik iuran Rp.10.000 per minggu yang langsung disetorkan ke RT atau RW setempat untuk diserahkan ke Bumdes setiap bulannya

- c. **Muatan Pengendalian**

Berdasarkan hasil FGD yang sudah dilaksanakan pengendalian mengenai pengelolaan melalui 2 pendekatan yaitu Regulatif dan Alokatif. Dimana berdasarkan kesepakatan bersama regulative yang dipakai ialah pemberian sanksi bagi yang melanggar, sementara pendekatan alokatif yang diambil adalah penarikan retribusi iuran yang dibebankan kepada masyarakat.

- **Pendekatan Regulatif**  
Pendekatan regulative berupa sanksi diharapkan menciptakan efek jera bagi siapapun pelanggarnya. Nantinya sanksi yang diberikan adalah berupa denda sebesar Rp 1.000.000-. apabila membuang sampah sembarangan di Desa Panyocokan baik masyarakat lokal ataupun sekedar pendatang, bagi yang tidak mampu sanksi social akan diterapkan dimana sanksi tersebut berupa harus membersihkan dan membantu kinerja tim saber selama 1 minggu penuh dari pagi hingga selesai.
- **Pendekatan Alokatif**  
Adapun pengendalian pendekatan alokatif adalah berupa penarikan retribusi iuran setiap Kepala keluarga akan ditarik iuran Rp.10.000 per minggu yang langsung disetorkan ke RT atau RW setempat untuk diserahkan ke Pemdes setiap bulannya. Selain itu akan ada insentif bagi RW yang paling bersih diawal – awal program. Insentif yang diterapkan nantinya bisa berupa pembebasan retribusi iuran ataupun keringanan lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada nantinya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, wawancara, FGD, dan fakta dilapangan dihasilkan, Adapun muatan – muatan yang harus dimasukkan dalam Perdes mengenai Pengelolaan sampah diantaranya :

1. Muatan Perencanaan
  - a. Penjelasan Konsep 3R
  - b. Perencanaan Tahap Pewadahan
  - c. Perencanaan Tahap Pengumpulan
  - d. Perencanaan Tahap Pemilahan
  - e. Perencanaan Tahap Pengangkutan
  - f. Perencanaan Kelembagaan atau Stakeholder
2. Muatan Pelaksanaan
  - a. Peran, Fungsi dan Tugas Kelembagaan atau Stakeholder
  - b. Program dan Pengembangan Biaya Pengelolaan Sampah
3. Muatan Pengendalian
  - a. Regulative ( Sanksi )
  - b. Alokatif ( Insentif dan Retribusi )

#### Daftar Pustaka

- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. [www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1beaefc49ffull.pdf%0A](http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1beaefc49ffull.pdf%0A)
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : PT. Widya Karya.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi*, 7, 77–91.
- Nurmalasyiah, & Suryani, L. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 39–53.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2012). Perda No.15 Tahun 2012 Tentang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
- Wijayanti Bitta Ikarani, Chamid Chusharini (2021). *Kajian Pengendalian Pencemaran Air Laut Berdasarkan Partisipasi Masyarakat di Kawasan Pesisir Pantai Santolo Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut*. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. 1(1). 23-29